

Id : 16068

Call Number : 342.068 NAT K

Judul : Kajian Terhadap Penerapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Terhadap Jaksa Yang Telah Ditetapkan Sebagai Terpidana (Studi Kasus Poedji Rahardjo)/ oleh Novy Natalia

Pengarang : NATALIA, NOVY

Nim : 205060140

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Deskripsi Fisik : vii, 85 hal. lamp. 27 cm

Pembimbing : 1.BUDISETYOWATI, DWI ANDAYANI

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.HUKUM TATA NEGARA

Abstrak : abstrak (A) Nama: NOVY NATALIA (NIM: 205060140) (B) Judul Skripsi : Kajian Terhadap Penerapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Terhadap Jaksa Yang Telah Ditetapkan Sebagai Terpidana (Studi Kasus Poedji Rahardjo). (C) Halaman :vii+85+37+2011 (D) Kata Kunci: Penerapan Hukum, Jaksa Terpidana (E) Isi : Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan bagaimana cara melakukan hal-hal yang diatur, namun pada kenyataannya banyak terjadi penyelewengan hukum terhadap pelaksanaan putusan yang inkracht. Penyelewengan tersebut sering dilakukan oleh orang-orang yang berkelimpahan materi, terutama orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan Republik Indonesia. Seorang Jaksa yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Jaksa atau Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan tidak hormat, Pemberhentian dengan tidak hormat seorang Jaksa terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian.apakah Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 dapat diterapkan pada Jaksa yang terpidana seperti Poedji Rahardjo? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui

wawancara. Data penelitian memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi tidak berjalan dengan baik. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tersebut dapat diterapkan pada kasus Poedji Rahardjo tetapi kenyataannya tidak diterapkan karena sampai sekarang Poedji Rahardjo masih mejadi seorang Pegawai Negeri Sipil dan tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji. Sebaiknya Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan memperhatikan isi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008. (F)Acuan : 37 (1959-2010) (G)Pembimbing: H. Rasji S.H., M.H. (H)Penulis :Novy Natalia DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i DAFTAR ISI
v ABSTRAK
vii BAB I PENDAHULUAN
A.LatarBelakang 1 B.Permasalahan
9 C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
9 D.KerangkaKonseptual
10 E.MetodePenelitian
12 F.SistematikaPenulisan
14 BAB I KERANGKA TEORI A. Pidana
1. Perbuatan Pidana
16 2. Sanksi Pidana
18 B. Pegawai Negeri 1. Pengertian Pegawai Negeri
21 2. Pemberhentian Pegawai Negeri
23 C. Kejaksaan 1. Pengertian Kejaksaan Dan Jaksa
25 2. Tugas Dan Wewenang
27 3. Hak Dan Kewajiban Jaksa
29 4. Pengangkatan Jaksa
35 5. Pemberhentian Jaksa
36 BAB II DATA HASIL PENELITIAN A. Kasus Posisi
41 B. Dakwaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
46 C. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
48 D. Putusan Pengadilan Tinggi
49 E. Surat Protes Atas Pengawasan Pelaksanaan Putusan
51 F. Pelaksanaan Putusan
53 G. Status Kepegawaian Dan Hak-Haknya
60 BAB III ANALISIS PENERAPAN PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2008 TERHADAP JAKSA POEDJIRAHARDJO A. Ruang Lingkup Sanksi Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008
63 B. Penerapan Sanksi Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Terhadap Jaksa Poedji Rahardjo
72 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan
84 B. Saran
85 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN